

ANALISIS SOAL
Persimpangan Etika dan Paradigma Pemerintahan



Oleh;
Nama:Nela Azkia
Npm:2513053188
Kelas 1G

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025

1. Bagaimanakah sistem etika perilaku politik saat ini? Sudah sesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan!

Jika dilihat dari kondisi politik sekarang, sistem etika perilaku politik di Indonesia masih berada pada tahap transisi moral, antara idealisme reformasi dan realitas kepentingan kekuasaan. Secara formal, nilai-nilai Pancasila sudah sering disebut dalam setiap kebijakan dan pidato politik. Namun secara substansial, implementasinya masih belum konsisten.

1. Banyak politisi atau birokrat yang menjadikan jabatan sebagai alat kepentingan pribadi dan kelompok, bukan sarana pengabdian.
2. Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan sering hanya menjadi slogan, tanpa diwujudkan dalam kejujuran, tanggung jawab, dan empati terhadap rakyat.
3. Dalam praktik pemerintahan daerah, nilai keadilan dan persamaan sering tergeser oleh relasi patronase dan nepotisme.

Padahal, etika politik yang berlandaskan Pancasila seharusnya menuntun pejabat publik untuk:

1. Berani bersikap independen dan jujur meskipun tidak populer (sesuai sila ke-1 dan ke-2).
2. Menjalankan keputusan berdasarkan musyawarah dan keadilan sosial (sila ke-4 dan ke-5).
3. Mengutamakan pelayanan publik di atas kepentingan politik.

Sistem etika perilaku politik di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, meskipun secara formal selalu dijadikan dasar dalam setiap peraturan dan pidato politik. Dalam praktiknya, etika politik kita masih diwarnai oleh budaya kekuasaan, kepentingan pribadi, dan lemahnya integritas moral para pejabat publik.

Sila ke-1: Ketuhanan Yang Maha Esa

- Idealnya: pejabat publik menjunjung nilai kejujuran, tanggung jawab, dan moralitas tinggi sebagai bentuk keimanan.
- Kenyataan: masih banyak pelaku politik yang menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan dan kekuasaan, seperti suap, fitnah, dan manipulasi data. Ini menunjukkan perilaku politik yang tidak sesuai dengan nilai Ketuhanan yang menuntun pada moral dan kejujuran.

Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- Idealnya: kebijakan dan pelayanan publik harus memperlakukan semua warga negara secara adil dan manusiawi.
- Kenyataan: masih sering terjadi diskriminasi dalam pelayanan publik dan ketidakadilan hukum bagi masyarakat kecil. Maka, etika politik di Indonesia belum mencerminkan kemanusiaan yang beradab karena keadilan sering berpihak pada mereka yang berkuasa.

Sila ke-3: Persatuan Indonesia

- Idealnya: politik harus menjadi sarana pemersatu bangsa.
- Kenyataan: praktik politik identitas, polarisasi, dan ujaran kebencian justru menimbulkan perpecahan. Etika politik yang baik seharusnya menjaga harmoni, namun realitas politik saat ini sering bertentangan dengan semangat persatuan.

Sila ke-4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

- Idealnya: pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan kebijaksanaan untuk kepentingan rakyat.
- Kenyataan: banyak keputusan politik yang lebih didasarkan pada kepentingan partai atau elite, bukan aspirasi rakyat. Etika politik di sini kurang sesuai karena demokrasi dijalankan secara prosedural, bukan substansial.

Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- Idealnya: semua kebijakan politik bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan rakyat.
- Kenyataan: masih terdapat ketimpangan ekonomi, birokrasi yang koruptif, dan pelayanan publik yang tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa etika politik belum berhasil mewujudkan keadilan sosial.

2. Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika, pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai (baik atau buruk). Bagaimanakah etika generasi muda yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Apakah mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia? Berikan solusi mengenai adanya degradasi moral yang saat ini terjadi !

Etika generasi muda saat ini menunjukkan pergeseran nilai yang cukup tajam. Di lingkungan saya, banyak anak muda yang sebenarnya cerdas, terbuka terhadap informasi, dan punya semangat tinggi untuk maju. Namun di sisi lain, muncul kecenderungan menurunnya kepekaan sosial dan moralitas, terutama karena pengaruh teknologi dan gaya hidup yang serba instan.

Fenomena seperti kurangnya rasa hormat terhadap orang tua, meniru perilaku selebriti tanpa filter, sibuk dengan media sosial, serta mudah terprovokasi oleh informasi tanpa klarifikasi, menjadi tanda bahwa sebagian generasi muda mulai menjauh dari nilai-nilai etika bangsa. Padahal, etika bangsa Indonesia dibangun atas dasar gotong royong, kesantunan, dan tanggung jawab sosial, yang semuanya bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

1. Nilai Ketuhanan mulai memudar karena banyak yang menganggap etika agama bukan prioritas.
2. Nilai Kemanusiaan dan Persatuan terkikis karena egoisme dan individualisme.
3. Nilai Kerakyatan dan Keadilan Sosial sulit diwujudkan karena lebih banyak yang mengejar kepentingan pribadi dibanding kepedulian terhadap lingkungan.

Namun demikian, tidak adil jika generasi muda selalu disalahkan. Banyak di antara mereka tumbuh dalam sistem sosial dan politik yang tidak memberikan contoh etika baik. Ketika pejabat publik korup, tokoh masyarakat kehilangan integritas, dan media menonjolkan sensasi ketimbang moral, maka generasi muda kehilangan figur panutan yang seharusnya mereka tiru.

Oleh karena itu, solusi dekadensi moral tidak cukup hanya lewat pendidikan formal, tapi juga harus menyentuh lingkungan sosial dan sistem nilai di masyarakat. Beberapa langkah yang bisa dilakukan:

1. Revitalisasi pendidikan karakter berbasis nilai lokal dan Pancasila. Sekolah harus menjadi tempat pembentukan kepribadian, bukan sekadar tempat mencari nilai akademik.
2. Keteladanan dari keluarga dan tokoh publik. Orang tua, guru, dan pemimpin masyarakat harus menjadi contoh nyata etika berperilaku dan bersikap jujur.
3. Kegiatan sosial dan budaya berbasis komunitas. Generasi muda perlu dilibatkan dalam aksi nyata seperti kegiatan sosial, lingkungan, dan kepemimpinan agar nilai gotong royong dan empati tumbuh alami.
4. Etika digital. Ajarkan tanggung jawab bermedia sosial, agar mereka tidak hanya pandai berteknologi, tetapi juga bermoral di dunia maya.
5. Gerakan moral bersama. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat perlu bekerja sama menciptakan ruang publik yang sehat dan menghargai nilai-nilai kejujuran serta solidaritas.

Etika generasi muda saat ini masih perlu dibimbing agar tidak terjebak pada arus modernitas tanpa arah moral. Solusi utama bukan hanya memperbanyak aturan, tetapi membangun keteladanan nyata dan kesadaran moral kolektif. Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila dapat kembali menjadi pedoman hidup, bukan sekedar simbol di dinding kelas atau kantor pemerintahan.